



**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Gedung Diskominfo DIY Lantai 2, Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152  
Telepon/Fax : (0274) 374289, E-mail: [kip-diy@jogjaprovo.go.id](mailto:kip-diy@jogjaprovo.go.id), Website: [komisi-informasi.jogjaprovo.go.id](http://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id)

---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2020**

**1. Latar Belakang**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membawa konsekuensi perubahan paradigma ke arah keterbukaan. Bagi lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, penyelenggara negara maupun lembaga/organisasi yang mengelola bantuan luar negeri maupun dana masyarakat, harus memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, juga mengamanatkan kepada Komisi Informasi untuk menjalankan Undang-undang ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23: *"Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi"*.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Monitoring dan Evaluasi kepada badan publik dilakukan satu kali dalam setahun dan disampaikan ke badan publik kemudian diumumkan ke publik.

**2. Dasar Kegiatan, Maksud, dan Tujuan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY didasarkan pada Pasal 23 UU KIP dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik.

Adapun maksud dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi Keterbukaan informasi Tahun 2020 adalah untuk:

1. mengetahui terpenuhinya hak publik dalam mendapatkan layanan informasi publik yang dilakukan Badan Publik dan upaya-upaya yang dilakukan Badan Publik dalam melaksanakan kewajibannya memberikan informasi Publik kepada setiap warga negara;
2. pemeringkatan keterbukaan informasi bagi setiap Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. menentukan Juara keterbukaan informasi publik pada setiap klaster yang ditentukan oleh Tim Monitoring dan evaluasi Keterbukaan informasi Tahun 2020.

### **3. Proses dan Mekanisme**

Tahun ini adalah Tahun keenam Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh UU KIP, dengan metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dalam konteks wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2020 ini, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik dari beberapa instansi di luar KID DIY baik dari lembaga perguruan tinggi (Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Program Studi Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, dan Klinik Keterbukaan Informasi Universitas Islam Indonesia), dari lembaga penelitian (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), dan juga dari *Civil Society Organization* CSO (IDEA Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, dan *Combine Resource Institution*).

Mereka berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sejak merumuskan instrumen penilaian sampai melakukan penilaian. Pelibatan tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga objektivitas juga secara umum untuk meningkatkan kualitas monev.

Tim Monev Tahun 2020 juga menyepakati beberapa ketentuan pokok antara lain bahwa kategori yang dimonev terdiri dari :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
2. OPD Pemerintah Daerah DIY;
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
4. OPD Kecamatan se-DIY;
5. Lembaga Legislatif se-DIY;
6. Partai Politik di DIY;
7. Lembaga Yudikatif di DIY;
8. Instansi Vertikal di DIY; dan
9. Badan Usaha Milik Daerah se-DIY.

#### **A. Pemeringkatan (Kualifikasi)**

Selain untuk untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori/*cluster* (seperti tahun-tahun sebelumnya), Monev tahun 2020 ini (berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya) juga dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik, dengan demikian seluruh badan publik akan mengetahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap badan publik tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang. Tahapan penilaian dan bobotnya untuk melakukan pemeringkatan meliputi :

<b>No.</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Bobot</b>
1.	Self Assesment Questionnaire (SAQ)	30%
2.	Verifikasi Website	35%
3.	Uji Akses	35%

Untuk mendapatkan hasil yang presisif sesuai dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, Komisi Informasi Daerah DIY melakukan 3 (tiga) proses penilaian dalam Tahapan pertama Pemeringkatan:

**Self Assesment Questionnaire (SAQ)** memiliki bobot 30%, Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) ke seluruh Badan Publik. Penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Publik dengan mengisi kuesioner yang yang diunduh melalui Laman KID DIY, Selanjutnya seluruh badan publik yang mengembalikan kuesioner tersebut kemudian dinilai oleh Tim Monev. Tahapan dilakukan pada tanggal 15 Juni – 03 Agustus 2020.

**Verifikasi Website** memiliki bobot 35%, Verifikasi *Website* atau pencermatan *Website* oleh Tim Monev berdasarkan badan publik yang mengembalikan kuesioner penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*). Tahapan dilakukan pada tanggal 03 Agustus – 04 September 2020

**Uji Akses** memiliki bobot 35%, Uji Akses yang dilakukan melalui surat elektronik *e-mail* Badan Publik yang tercantum dalam SAQ (*Self Assessment Questioner*). Penilaian di tentukan berdasarkan respon Badan Publik dan bobot jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Tim mempergunakan *e-mail* pribadi masing masing anggota tim. Tahapan dilakukan pada tanggal 14 September – 23 Oktober 2020.

Dari tiga proses tersebut maka dapat diketahui jumlah Hasil Akhir nilai berupa Kualifikasi :

1. Informatif : Nilai 90 - 100
2. Menuju Informatif : Nilai 80 - 89
3. Cukup Informatif : Nilai 60 - 79
4. Kurang Informatif : Nilai 40 - 59
5. Tidak Informatif : Nilai < 40

## **B. Kejuaraan**

Penentuan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori/*cluster* dilakukan dengan visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap *cluster* dengan syarat apabila nilainya minimal 80 (paling tidak memenuhi kualifikasi “Menuju Informatif”). Sebagai upaya pencegahan meluasnya penularan *covid-19* pada *cluster* perkantoran, visitasi dilakukan secara online dan dilaksanakan pada tanggal 23 - 30 November 2020.

Kedua penilaian tersebut Pemingkatan dan Kejuaraan pada prinsipnya dilakukan untuk mencermati sejauh mana informasi publik dikuasai badan publik berdasarkan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Informasi tersebut yakni informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hal ini penting agar badan publik memiliki pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengelola informasi publik.

#### 4. Data Pengembalian Kuesioner

Dari sebanyak 363 kuesioner yang dikirimkan/diunduh sebanyak 343 atau 89,56% dari total 100% Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan. Rinciannya sebagai berikut:

#### DATA PENGEMBALIAN KUESIONER (SAQ) MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2020

No	Kategori Monev	Total Pengiriman	Total Pengembalian	Tidak Mengembalikan	Persentase
1	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY	5	5	0	100%
2	OPD PEMERINTAH DAERAH DIY	38	38	0	100%
3	OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY	159	157	2	99%
4	OPD KECAMATAN SE-DIY	78	78	0	100%
5	LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY	6	6	0	100%
6	PARTAI POLITIK DI DIY	10	3	7	30%
7	LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY	20	13	7	65%
8	INSTANSI VERTIKAL DI DIY	50	28	22	56%
9	BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY	17	15	2	88%
TOTAL		383	343	40	
Persentase Pengembalian					89.56%
Persentase tidak mengembalikan					10.44%

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan Penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) oleh KID DIY sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga), sedang badan publik yang mengembalikan Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) atau 89,56% (Delapan Puluh Sembilan koma lima puluh enam persen). Dan yang tidak mengembalikan sebanyak 40 (empat puluh) Badan Publik atau 10,44% (sepuluh koma empat puluh empat persen)

## 5. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 terdiri dari tiga penghargaan yang diberikan kepada badan publik terdiri dari Pemeringkatan, Kejuaraan dan pemberian apresiasi kepada Lembaga atau perseorangan yang berkomitmen kepada Keterbukaan Informasi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### A. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam pemeringkatan, Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di wilayah DIY tahun 2020, kemudian menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi ke dalam Surat Keputusan nomor 03/KEP/KIDDIY/XII/2020 tentang “Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020”

## HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2020 BERDASARKAN PEMERINGKATAN / KUALIFIKASI BADAN PUBLIK

### 1. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “INFORMATIF”

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
1.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	26.40	32.38	35.00	93.78
2.	Pemerintah Kabupaten Bantul	24.90	32.94	35.00	92.84
OPD PEMERINTAH DAERAH DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	27.21	34.56	35.00	96.77
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	30.00	30.36	31.50	91.86
OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
1.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	30.00	34.56	35.00	99.56

2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	29.40	35.00	35.00	99.40
3.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul	29.49	34.13	35.00	98.62
4.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	29.91	33.47	35.00	98.38
5.	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	29.79	33.47	35.00	98.26
6.	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sleman	26.40	34.56	35.00	95.96
7.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman	26.40	34.56	35.00	95.96
8.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	25.50	35.00	35.00	95.50
9.	Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul	30.00	28.66	35.00	93.66
10.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	27.51	30.63	35.00	93.14
11.	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul	26.91	31.06	35.00	92.97
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Kulon Progo	27.09	30.85	35.00	92.94
13.	Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari	26.79	30.36	35.00	92.15
14.	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul	27.00	29.97	35.00	91.97
15.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul	23.91	33.47	33.25	90.63
16.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	24.30	31.06	35.00	90.36
<b>OPD KECAMATAN SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Kecamatan Nanggulan	29.40	32.81	31.50	93.71

2.	Kecamatan Moyudan	26.40	32.25	35.00	93.65
3.	Kecamatan Depok	27.00	29.53	35.00	91.53
4.	Kecamatan Kalibawang	24.60	31.06	35.00	90.66
<b>LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	27.51	31.50	31.50	<b>90.51</b>
<b>INSTANSI VERTIKAL DI DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) DIY	28.11	33.60	35.00	96.71
2.	Balai Besar Kulit, Karet (BBKRP) Provinsi D.I. Yogyakarta	29.40	29.97	35.00	94.37
3.	Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY	27.81	31.06	35.00	93.87
4.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY	27.00	31.85	35.00	93.85
5.	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY	29.40	33.69	29.75	92.84
6.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta	25.50	31.94	33.25	90.69

## 2. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “MENUJU INFORMATIF”

<b>PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	28.89	30.85	29.75	89.49
2.	Pemerintah Kota Yogyakarta	27.09	28.44	31.50	87.03
3.	Pemerintah Kabupaten Sleman	28.71	29.53	24.50	82.74
<b>OPD PEMERINTAH DAERAH DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY	23.91	26.21	35.00	85.12
2.	Badan Kepegawaian Daerah DIY	28.89	35.00	17.50	81.39



<b>OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Bantul	25.59	29.31	35.00	<b>89.90</b>
2.	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	28.29	25.81	35.00	<b>89.10</b>
3.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Sleman	25.71	31.50	31.50	<b>88.71</b>
4.	RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul	26.10	27.13	35.00	<b>88.23</b>
5.	Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul	27.90	25.07	35.00	<b>87.97</b>
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul	26.91	25.95	35.00	<b>87.86</b>
7.	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Sleman	26.49	26.25	35.00	<b>87.74</b>
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo	24.69	28.00	35.00	<b>87.69</b>
9.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Sleman	25.50	30.41	31.50	<b>87.41</b>
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Sleman	27.69	24.46	35.00	<b>87.15</b>
11.	Dinas Pariwisata Kab. Bantul	23.91	33.47	29.75	<b>87.13</b>
12.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo	23.70	28.00	35.00	<b>86.70</b>
13.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman	20.61	31.06	35.00	<b>86.67</b>
14.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul	22.80	28.40	35.00	<b>86.20</b>
15.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	19.59	32.38	33.25	<b>85.22</b>
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul	23.70	26.38	35.00	<b>85.08</b>
17.	Inspektorat Kab. Sleman	23.79	26.25	35.00	<b>85.04</b>
18.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo	28.29	32.16	24.50	<b>84.95</b>
19.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo	26.40	31.20	26.25	<b>83.85</b>
20.	Dinas Kebudayaan Kab. Sleman	26.61	34.56	21.00	<b>82.17</b>

21.	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul	28.71	21.22	31.50	<b>81.43</b>
22.	Dinas Perhubungan Kab. Bantul	14.70	31.72	35.00	<b>81.42</b>
23.	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul	21.90	24.06	35.00	<b>80.96</b>
24.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul	13.50	32.38	35.00	<b>80.88</b>
25.	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul	26.49	19.38	35.00	<b>80.87</b>
26.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	12.00	35.00	33.25	<b>80.25</b>
27.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	19.20	25.99	35.00	<b>80.19</b>
<b>OPD KECAMATAN SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Kecamatan Mlati	22.11	31.06	35.00	<b>88.17</b>
2.	Kecamatan Semanu	24.39	30.80	31.50	<b>86.69</b>
3.	Kecamatan Tanjungsari	25.29	25.11	35.00	<b>85.40</b>
4.	Kecamatan Godean	25.29	28.35	29.75	<b>83.39</b>
5.	Kecamatan Patuk	25.50	21.57	35.00	<b>82.07</b>
6.	Kecamatan Pajangan	20.91	24.68	35.00	<b>80.59</b>
7.	Kecamatan Girimulyo	26.40	23.89	29.75	<b>80.04</b>
<b>LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	DPRD Kabupaten Kulon Progo	25.89	29.31	31.50	86.70
2.	DPRD Kabupaten Bantul	21.99	30.41	31.50	83.90
<b>LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Pengadilan Agama Wonosari	24.99	29.71	35.00	89.70
2.	Pengadilan Negeri Wates	25.29	31.94	31.50	88.73

3.	Pengadilan Agama Wates	22.89	31.72	31.50	86.11
4.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	27.81	21.61	35.00	84.42
5.	Pengadilan Agama Sleman	23.19	27.52	31.50	82.21
INSTANSI VERTIKAL DI DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kulon Progo	25.71	26.95	35.00	87.66
2.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Sleman	22.89	29.40	35.00	87.29
3.	Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DIY	20.61	26.51	35.00	82.12
BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
1.	Bank Jogja	19.70	29.05	31.50	80.25

### 3. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “CUKUP INFORMATIF”

OPD PEMERINTAH DAERAH DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
1.	Dinas Kesehatan DIY	24.70	19.21	35.00	<b>78.91</b>
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	18.30	21.83	35.00	<b>75.13</b>
3.	Rumah Sakit Paru Respira	28.11	15.05	31.50	<b>74.66</b>
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	19.71	20.96	31.50	<b>72.17</b>
5.	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	28.59	15.27	21.00	<b>64.86</b>
OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
1.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gunung Kidul	24.00	24.02	31.50	<b>79.52</b>
2.	Dinas Pertanahan dan Tata ruang Kabupaten Gunung Kidul	23.01	21.22	35.00	<b>79.23</b>

3.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kulon Progo	23.40	19.95	35.00	<b>78.35</b>
4.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo	26.01	22.53	29.75	<b>78.29</b>
5.	Dinas Koperasi Ukm Dan Perindustrian Kab. Bantul	10.71	33.91	33.60	<b>78.22</b>
6.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Kulon Progo	27.30	24.37	26.25	<b>77.92</b>
7.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sleman	27.21	26.25	21.35	<b>74.81</b>
8.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kab. Bantul	10.50	28.44	35.00	<b>73.94</b>
9.	Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo	21.81	21.75	29.75	<b>73.31</b>
10.	Dinas Kesehatan Kab. Bantul	19.20	18.73	35.00	<b>72.93</b>
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Kulon Progo	28.59	8.58	35.00	<b>72.17</b>
12.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul	8.79	26.12	35.00	<b>69.91</b>
13.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kulon Progo	30.00	34.35	3.50	<b>67.85</b>
14.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	16.41	22.75	26.25	<b>65.41</b>
15.	Inspektorat Daerah Kab. Bantul	13.80	30.41	21.00	<b>65.21</b>
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul	21.69	15.84	26.60	<b>64.13</b>
17.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo	24.99	24.94	14.00	<b>63.93</b>
18.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo	25.29	35.00	3.50	<b>63.79</b>
19.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo	20.19	25.95	17.50	<b>63.64</b>
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sleman	25.80	6.13	31.50	<b>63.43</b>
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Kidul	18.69	8.93	35.00	<b>62.62</b>
22.	Dinas Kebudayaan Kab. Kulon Progo	22.11	22.97	17.50	<b>62.58</b>

23.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul	22.29	24.15	16.10	<b>62.54</b>
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Kidul	15.90	14.61	31.50	<b>62.01</b>
25.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	15.81	24.37	21.00	<b>61.18</b>
26.	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta	11.61	14.35	35.00	<b>60.96</b>
27.	RSUD Kota Yogyakarta	16.41	9.36	35.00	<b>60.77</b>
28.	Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Yogyakarta	21.39	3.94	35.00	<b>60.33</b>
<b>OPD KECAMATAN SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Kecamatan Panggang	23.61	24.85	31.50	<b>79.96</b>
2.	Kecamatan Tempel	25.29	27.96	26.60	<b>79.85</b>
3.	Kecamatan Semin	26.79	21.35	31.50	<b>79.64</b>
4.	Kecamatan Tepus	26.01	22.05	31.50	<b>79.56</b>
5.	Kecamatan Wonosari	21.09	23.32	35.00	<b>79.41</b>
6.	Kecamatan Imogiri	21.21	23.15	35.00	<b>79.36</b>
7.	Kecamatan Temon	24.00	29.10	26.25	<b>79.35</b>
8.	Kecamatan Nglipar	24.99	22.66	31.50	<b>79.15</b>
9.	Kecamatan Playen	24.51	22.01	31.50	<b>78.02</b>
10.	Kecamatan Karangmojo	23.40	18.81	35.00	<b>77.21</b>
11.	Kecamatan Pleret	22.41	22.66	31.50	<b>76.57</b>
12.	Kecamatan Saptosari	20.70	19.82	35.00	<b>75.52</b>
13.	Kecamatan Jetis	27.60	12.21	35.00	<b>74.81</b>
14.	Kecamatan Rongkop	21.40	18.16	35.00	<b>74.56</b>
15.	Kecamatan Wates	15.60	29.10	29.75	<b>74.45</b>
16.	Kecamatan Ponjong	19.20	19.82	35.00	<b>74.02</b>

17.	Kecamatan Lendah	22.80	20.96	29.75	<b>73.51</b>
18.	Kecamatan Bambanglipuro	17.31	20.74	35.00	<b>73.05</b>
19.	Kecamatan Piyungan	14.91	22.88	35.00	<b>72.79</b>
20.	Kecamatan Sedayu	15.81	20.13	35.00	<b>70.94</b>
21.	Kecamatan Sentolo	30.00	34.56	3.50	<b>68.06</b>
22.	Kecamatan Pakem	20.49	20.74	26.60	<b>67.83</b>
23.	Kecamatan Prambanan	24.90	25.60	16.10	<b>66.60</b>
24.	Kecamatan Cangkringan	25.41	26.78	14.00	<b>66.19</b>
25.	Kecamatan Ngaglik	27.90	34.56	3.50	<b>65.96</b>
26.	Kecamatan Paliyan	15.39	13.17	35.00	<b>63.56</b>
27.	Kecamatan Pengasih	24.60	34.56	3.50	<b>62.66</b>
28.	Kecamatan Banguntapan	15.90	16.80	29.75	<b>62.45</b>
<b>LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Pengadilan Agama Yogyakarta	23.49	21.22	35.00	<b>79.71</b>
2.	Kejaksaan Tinggi DIY	22.20	10.55	29.75	<b>62.50</b>
<b>INSTANSI VERTIKAL DI DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul	14.40	31.72	33.25	<b>79.37</b>
2.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Yogyakarta	16.41	17.37	35.00	<b>68.78</b>
3.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Bantul	15.30	14.26	35.00	<b>64.56</b>
4.	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta	15.00	19.69	29.75	<b>64.44</b>
5.	Kanwil BPN DIY	0.00	27.56	35.00	<b>62.56</b>
6.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul	26.79	34.56	0.00	<b>61.35</b>

#### 4. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “KURANG INFORMATIF”

OPD PEMERINTAH DAERAH DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
1.	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, Setda DIY	26.40	29.31	0.00	<b>55.71</b>
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY	22.89	28.61	0.00	<b>51.50</b>
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	25.80	24.68	0.00	<b>50.48</b>
4.	Dinas Koperasi dan UKM DIY	23.70	25.51	0.00	<b>49.21</b>
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	17.70	25.55	3.50	<b>46.75</b>
6.	Inspektorat Daerah DIY	19.50	26.25	0.00	<b>45.75</b>
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY	22.89	18.46	3.50	<b>44.85</b>
8.	Dinas Pariwisata DIY	24.09	19.51	0.00	<b>43.60</b>
9.	Biro Bina Mental Spiritual, Setda DIY	22.71	20.30	0.00	<b>43.01</b>
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	19.11	23.36	0.00	<b>42.47</b>
11.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	14.70	26.86	0.00	<b>41.56</b>
OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta	6.00	18.20	35.00	<b>59.20</b>
2.	Dinas Pendidikan Kab. Sleman	25.59	33.21	0.00	<b>58.80</b>
3.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Kulon Progo	29.61	29.10	0.00	<b>58.71</b>
4.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	20.01	4.99	31.50	<b>56.50</b>
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman	24.69	31.06	0.00	<b>55.75</b>

6.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kab. Sleman	24.21	31.50	0.00	<b>55.71</b>
7.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Sleman	22.89	32.81	0.00	<b>55.70</b>
8.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Kulon Progo	12.60	29.10	14.00	<b>55.70</b>
9.	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Kulon Progo	24.39	27.56	3.50	<b>55.45</b>
10.	RSUD Nyi Ageng Serang	10.41	20.21	24.50	<b>55.12</b>
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Sleman	23.61	31.50	0.00	<b>55.11</b>
12.	RSUD Wates	25.20	29.75	0.00	<b>54.95</b>
13.	Inspektorat Kota Yogyakarta	15.60	13.08	26.25	<b>54.93</b>
14.	Bagian Administrasi dan Pembangunan Kota Yogyakarta	5.49	14.40	35.00	<b>54.89</b>
15.	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul	23.61	3.50	26.60	<b>53.71</b>
16.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta	23.01	3.94	26.60	<b>53.55</b>
17.	Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo	28.41	24.06	0.00	<b>52.47</b>
18.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	16.59	14.83	21.00	<b>52.42</b>
19.	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Gunung Kidul	26.01	26.21	0.00	<b>52.22</b>
20.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunung Kidul	18.81	0.88	31.50	<b>51.19</b>
21.	Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Dan Kerjasama Kota Yogyakarta	3.00	12.86	35.00	<b>50.86</b>
22.	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta	22.59	3.06	24.50	<b>50.15</b>
23.	Dinas Kebudayaan Kab. Bantul	18.90	31.06	0.00	<b>49.96</b>



24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul	26.10	23.80	0.00	<b>49.90</b>
25.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kab. Kulon Progo	18.39	17.50	14.00	<b>49.89</b>
26.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Kidul	20.70	29.01	0.00	<b>49.71</b>
27.	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul	5.61	8.93	35.00	<b>49.54</b>
28.	RSUD Prambanan	24.21	25.29	0.00	<b>49.50</b>
29.	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Bantul	24.69	24.50	0.00	<b>49.19</b>
30.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul	22.59	26.38	0.00	<b>48.97</b>
31.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul	25.89	22.88	0.00	<b>48.77</b>
32.	Dinas Sosial Kab. Sleman	24.30	23.85	0.00	<b>48.15</b>
33.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	18.51	8.10	21.00	<b>47.61</b>
34.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta	0.50	11.55	35.00	<b>47.05</b>
35.	Inspektorat Kabupaten Gunung Kidul	26.31	20.70	0.00	<b>47.01</b>
36.	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta	15.99	16.15	14.00	<b>46.14</b>
37.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul	20.79	23.98	0.00	<b>44.77</b>
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bantul	11.01	33.25	0.00	<b>44.26</b>
39.	Dinas Perhubungan Kab. Sleman	25.11	17.24	0.00	<b>42.35</b>
40.	Sekretariat Daerah Kab. Sleman	15.39	26.69	0.00	<b>42.08</b>

41.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman	23.19	18.77	0.00	<b>41.96</b>
42.	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kab. Sleman	17.49	24.15	0.00	<b>41.64</b>
43.	Badan Kepegawaian Pelatihan Dan Pendidikan Kota Yogyakarta	18.69	19.21	3.50	<b>41.40</b>
44.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul	19.71	21.22	0.00	<b>40.93</b>
<b>OPD KECAMATAN SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Kecamatan Mantrijeron	24.81	33.86	0.00	<b>58.67</b>
2.	Kecamatan Pandak	9.99	13.30	35.00	<b>58.29</b>
3.	Kecamatan Ngemplak	22.80	32.60	0.00	<b>55.40</b>
4.	Kecamatan Pundong	8.31	17.06	26.60	<b>51.97</b>
5.	Kecamatan Kasihan	20.40	30.85	0.00	<b>51.25</b>
6.	Kecamatan Samigaluh	19.20	26.69	3.50	<b>49.39</b>
7.	Kecamatan Gondokusuman	21.90	25.51	0.00	<b>47.41</b>
8.	Kecamatan Girisubo	21.81	20.91	0.00	<b>42.72</b>
9.	Kecamatan Gamping	18.21	23.54	0.00	<b>41.75</b>
10.	Kecamatan Purwosari	21.40	20.35	0.00	<b>41.74</b>
11.	Kecamatan Bantul	19.89	21.35	0.00	<b>41.24</b>
12.	Kecamatan Kalasan	20.61	20.56	0.00	<b>41.17</b>
13.	Kecamatan Panjatan	0.00	10.68	29.75	<b>40.43</b>
<b>LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	DPRD Kab. Gunungkidul	26.70	31.02	0.00	<b>57.72</b>
2.	DPRD Kab. Sleman	24.30	19.69	3.50	<b>47.49</b>

3.	DPRD DIY	7.29	13.48	21.00	41.77
<b>LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Pengadilan Agama Bantul	26.40	31.72	0.00	<b>58.12</b>
2.	Pengadilan Negeri Wonosari	26.40	30.36	0.00	<b>56.76</b>
3.	Pengadilan Negeri Sleman	21.39	22.31	0.00	<b>43.70</b>
4.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	21.39	16.41	3.50	<b>41.30</b>
<b>INSTANSI VERTIKAL DI DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi DIY	14.10	33.95	0.00	<b>48.05</b>
2.	Kepolisian Daerah (POLDA) DIY	3.81	5.69	35.00	<b>44.50</b>
3.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo	8.19	35.00	0.00	<b>43.19</b>
4.	Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo	14.31	28.22	0.00	<b>42.53</b>
<b>BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Bank Daerah Gunungkidul	16.80	24.15	15.75	<b>56.70</b>
2.	PT BPR Bank Sleman	28.40	27.30	0.00	<b>55.70</b>
3.	PD BPR Bank Bantul	20.90	27.30	0.00	<b>48.20</b>
4.	PD Bank Pasar Kab. Kulon Progo	23.20	21.70	0.00	<b>44.90</b>

## 5. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “TIDAK INFORMATIF”

<b>OPD PEMERINTAH DAERAH DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	20.10	19.21	0.00	<b>39.31</b>
2.	Badan Penghubung Daerah DIY	20.61	16.80	0.00	<b>37.41</b>

3.	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Setda DIY	10.89	4.99	21.00	<b>36.88</b>
4.	Dinas Kebudayaan DIY	17.61	13.83	0.00	<b>31.44</b>
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	14.31	14.18	0.00	<b>28.49</b>
6.	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda DIY	15.99	7.44	0.00	<b>23.43</b>
7.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	4.00	16.15	0.00	<b>20.14</b>
8.	Biro Organisasi, Setda DIY	12.21	7.00	0.00	<b>19.21</b>
9.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	18.81	0.00	0.00	<b>18.81</b>
10.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	12.60	5.86	0.00	<b>18.46</b>
11.	Dinas Perhubungan DIY	7.29	8.93	0.00	<b>16.22</b>
12.	Dinas Sosial DIY	0.00	16.15	0.00	<b>16.15</b>
13.	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	8.01	3.94	0.00	<b>11.95</b>
14.	Biro Hukum, Setda DIY	1.90	6.78	0.00	<b>8.68</b>
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	0.40	7.18	0.00	<b>7.57</b>
16.	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Setda DIY	2.00	0.00	0.00	<b>2.00</b>
17.	Paniradya Keistimewaan DIY	0.40	0.88	0.00	<b>1.27</b>
18.	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab.Sleman	18.39	20.91	0.00	<b>39.30</b>
2.	Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman	19.80	19.30	0.00	<b>39.10</b>
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul	16.20	21.35	0.00	<b>37.55</b>
4.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bantul	10.50	25.81	0.00	<b>36.31</b>
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	9.69	25.33	0.00	<b>35.02</b>

6.	Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo	17.01	16.36	0.00	<b>33.37</b>
7.	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	16.11	16.58	0.00	<b>32.69</b>
8.	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	17.49	14.83	0.00	<b>32.32</b>
9.	Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo	22.50	8.58	0.00	<b>31.08</b>
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta	12.30	18.11	0.00	<b>30.41</b>
11.	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul	20.01	9.45	0.00	<b>29.46</b>
12.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	13.41	14.61	0.00	<b>28.02</b>
13.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Sleman	15.90	11.81	0.00	<b>27.71</b>
14.	Dinas Kesehatan Kab. Sleman	10.11	14.00	0.00	<b>24.11</b>
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul	14.40	9.63	0.00	<b>24.03</b>
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Sleman	17.79	5.25	0.00	<b>23.04</b>
17.	Bagian Tata Pemerintahan Dan Kesra Setda Kota Yogyakarta	12.39	9.80	0.00	<b>22.19</b>
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta	7.89	14.18	0.00	<b>22.07</b>
19.	Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta	16.20	3.50	0.00	<b>19.70</b>
20.	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	9.51	9.80	0.00	<b>19.31</b>
21.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul	14.40	3.06	0.00	<b>17.46</b>
22.	Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo	15.00	2.19	0.00	<b>17.19</b>
23.	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	4.11	12.86	0.00	<b>16.97</b>
24.	Dinas Sosial Kota Yogyakarta	3.90	12.86	0.00	<b>16.76</b>
25.	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	2.90	13.74	0.00	<b>16.64</b>

26.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	11.49	4.38	0.00	<b>15.87</b>
27.	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	1.90	12.86	0.00	<b>14.76</b>
28.	Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	4.71	8.49	0.00	<b>13.20</b>
29.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Bantul	8.40	2.19	0.00	<b>10.59</b>
30.	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta	0.00	10.24	0.00	<b>10.24</b>
31.	Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	2.50	7.09	0.00	<b>9.59</b>
32.	Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta	6.60	2.63	0.00	<b>9.23</b>
33.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kab. Bantul	2.00	6.04	0.00	<b>8.04</b>
34.	Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta	2.00	2.19	3.50	<b>7.69</b>
35.	Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	2.00	3.06	0.00	<b>5.06</b>
36.	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	2.50	2.19	0.00	<b>4.69</b>
37.	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	2.00	2.19	0.00	<b>4.19</b>
38.	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab.Bantul	2.00	1.75	0.00	<b>3.75</b>
39.	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	3.39	0.00	0.00	<b>3.39</b>
40.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	2.00	1.31	0.00	<b>3.31</b>
41.	Dinas Pariwisata Kab. Sleman	0.50	2.63	0.00	<b>3.13</b>
42.	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	2.00	0.00	0.00	<b>2.00</b>

<b>OPD KECAMATAN SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Kecamatan Gedangsari	19.01	19.82	0.00	<b>38.83</b>
2.	Kecamatan Ngawen	21.40	15.27	0.00	<b>36.67</b>
3.	Kecamatan Berbah	20.31	13.96	0.00	<b>34.27</b>
4.	Kecamatan Gedong Tengen	17.70	16.36	0.00	<b>34.06</b>
5.	Kecamatan Danurejan	8.31	20.08	3.50	<b>31.89</b>
6.	Kecamatan Galur	11.70	19.86	0.00	<b>31.56</b>
7.	Kecamatan Kokap	24.50	6.13	0.00	<b>30.63</b>
8.	Kecamatan Kretek	15.69	14.44	0.00	<b>30.13</b>
9.	Kecamatan Seyegan	19.80	9.36	0.00	<b>29.16</b>
10.	Kecamatan Sleman	12.21	16.15	0.00	<b>28.36</b>
11.	Kecamatan Minggir	12.21	15.49	0.00	<b>27.70</b>
12.	Kecamatan Srandakan	10.50	16.32	0.00	<b>26.82</b>
13.	Kecamatan Sanden	12.51	11.86	0.00	<b>24.37</b>
14.	Kecamatan Dlingo	14.61	9.10	0.00	<b>23.71</b>
15.	Kecamatan Umbulharjo	7.80	15.05	0.00	<b>22.85</b>
16.	Kecamatan Mergangsan	2.70	18.77	0.00	<b>21.47</b>
17.	Kecamatan Tegalrejo	6.00	14.61	0.00	<b>20.61</b>
18.	Kecamatan Kotagede	6.00	14.61	0.00	<b>20.61</b>
19.	Kecamatan Ngampilan	2.70	13.52	3.50	<b>19.72</b>
20.	Kecamatan Turi	6.39	13.04	0.00	<b>19.43</b>
21.	Kecamatan Gondomanan	3.00	16.32	0.00	<b>19.32</b>
22.	Kecamatan Sewon	8.61	8.27	0.00	<b>16.88</b>
23.	Kecamatan Pakualaman	2.60	10.68	3.50	<b>16.78</b>

24.	Kecamatan Wirobrajan	2.70	13.96	0.00	<b>16.66</b>
25.	Kecamatan Jetis	12.30	4.11	0.00	<b>16.41</b>
26.	Kecamatan Kraton	2.60	10.68	0.00	<b>13.28</b>
<b>LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	DPRD Kota Yogyakarta	20.40	14.18	0.00	34.58
<b>LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Kejaksaan Negeri Sleman	21.51	7.61	0.00	29.12
<b>LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Gunungkidul	3.81	4.11	31.50	<b>39.42</b>
2.	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY	18.90	17.98	0.00	<b>36.88</b>
3.	Kepolisian Resor (POLRES) Gunungkidul	24.60	9.15	0.00	<b>33.75</b>
4.	Kementrian Agama (KEMENAG) Sleman	2.40	30.41	0.00	<b>32.81</b>
5.	Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) DIY	0.30	30.63	0.00	<b>30.93</b>
6.	Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul	12.69	18.11	0.00	<b>30.80</b>
7.	Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional I Yogyakarta	23.31	4.38	0.00	<b>27.69</b>
8.	Kepolisian Resor (POLRES) Yogyakarta	9.99	5.25	3.50	<b>18.74</b>
9.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman	0.00	7.66	0.00	<b>7.66</b>



<b>BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	Bank BPD DIY	14.00	24.50	0.00	<b>38.50</b>
2.	PDAM Tirta Binangun Kab. Kulon Progo	0.00	0.00	29.75	<b>29.75</b>
3.	PDAM Tirta Handayani Kab. Gunungkidul	19.30	3.15	3.50	<b>25.95</b>
4.	PD Aneka Usaha Kab. Kulonprogo	9.60	5.60	0.00	<b>15.20</b>
5.	PD Jogjatama Vishesa	1.60	2.80	0.00	<b>4.40</b>
6.	PDAM Kab. Bantul	1.00	2.45	0.00	<b>3.45</b>
7.	PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta	0.00	3.15	0.00	<b>3.15</b>
8.	PT. Anindya Mitra Internasional (AMI) DIY	2.00	0.00	0.00	<b>2.00</b>
9.	PT Selo Adi Karto (SAK) Kab. Kulon Progo	0.00	1.05	0.00	<b>1.05</b>
10.	PD Taru Martani DIY	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>PARTAI POLITIK SE-DIY</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>SAQ</b>	<b>WEBSITE</b>	<b>UJI AKSES</b>	<b>TOTAL NILAI</b>
1.	DPD PAN DIY	3.99	0.00	0.00	<b>3.99</b>
2.	DPW NASDEM DIY	2.60	0.00	0.00	<b>2.60</b>
3.	DPD PSI DIY	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

## **B. Kejuaraan Keterbukaan Informasi Badan Publik**

Setelah didapat hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tim Monitoring dan Evaluasi kemudian visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap *cluster* dengan catatan yang telah disyaratkan badan publik tersebut minimal mempunyai nilai 80 (delapan puluh).

Hasil Kejuaraan Keterbukaan Informasi juga tertuang di dalam Surat Keputusan nomor 03/KEP/KIDDIY/XII/2020 tentang “Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020”

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK  
TAHUN 2020  
BERDASARKAN KEJUARAAN BADAN PUBLIK**

**1. KATEGORI : PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY**

<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	94.00
2.	Pemerintah Kabupaten Bantul	90.00
3.	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	86.50

**2. KATEGORI : OPD PEMERINTAH DAERAH DIY**

<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	90.00
2.	Badan Kepegawaian Daerah DIY	88.00
3.	Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY	78.00

**3. KATEGORI : OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY**

<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	94.00
2.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul	92.00
3.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	75.00

**4. KATEGORI : OPD KECAMATAN SE-DIY**

<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1.	Kecamatan Moyudan	94.00
2.	Kecamatan Depok	88.00
3.	Kecamatan Nanggulan	83.00

**5. KATEGORI : LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY**

<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1.	DPRD Kab. Bantul	91.50
2.	DPRD Kab. Kulon Progo	74.50

## 6. KATEGORI : LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	94.00
2.	Pengadilan Negeri Wates	93.00
3.	Pengadilan Agama Wonosari	78.00

## 7. KATEGORI : INSTANSI VERTIKAL DI DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) DIY	98.00
2.	Balai Besar Kulit, Karet (BBKKP) Provinsi D.I. Yogyakarta	92.00
3.	Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY	64.00

## 8. KATEGORI : BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BANK JOGJA	76.00

### C. Apresiasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Selain pemeringkatan dan kejuaraan tersebut, pada penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 ini, Tim Monev juga memberikan apresiasi kepada:

1. bapak Eko Suwanto sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik, mengingat jasa beliau sebagai Ketua Komisi A dan sekaligus Ketua Pansus untuk memperjuangkan lahirnya Perda DIY tentang keterbukaan informasi publik;
2. Combine Resource Institution sebagai CSO yang berperan aktif dalam mengembangkan sistem informasi desa;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai badan publik yang secara rutin menyampaikan laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada KID DIY.

## 6. Kondisi Umum dan Pembelajaran

Dari serangkaian proses monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Tim Monev Keterbukaan Informasi mendapatkan beberapa catatan, antara lain:

#### **a. Kondisi Umum**

Badan Publik masih belum mempunyai anggaran khusus untuk PPID baik untuk pengembangan peralatan pendukung maupun pengembangan sumber daya manusia. Badan Publik masih menggunakan anggaran dari bidang lain sehingga PPID belum optimal. Diperlukan perhatian khusus untuk mengalokasikan anggaran untuk pengembangan PPID sehingga meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Di beberapa Badan Publik petugas pelayanan informasi publik masih di rangkap oleh petugas pelayanan pelanggan sehingga pelayanan informasi publiknya kurang optimal.

Fasilitas dan petugas pelayanan informasi publik di PPID utama dan PPID Pembantu masih sama.

Beberapa Badan Publik belum menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya Pasal 11,12 dan 13.

#### **b. Catatan Khusus**

Dari berbagai hal yang ditemui selama monitoring dan evaluasi, terdapat catatan khusus yang perlu mendapat perhatian dari Badan Publik antara lain:

1. Badan Publik belum membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya ke Komisi Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j, Perki 1 Tahun 2010;
2. Pemahaman atas UU KIP masih perlu ditingkatkan karena banyak PPID dan petugas layanan informasi dan dokumentasi ( PLID) masih kurang memahami tentang UU KIP dan Perki;
3. Adanya kerancuan tentang informasi publik dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pelayanan tugas pokok Badan Publik;
4. Belum tersedianya ruang khusus untuk PPID untuk sebagian badan publik;
5. Belum tersedia komputer khusus bagi para pemohon untuk mengakses sendiri informasi publik yang dimaksud untuk sebagian badan publik;

6. Beberapa Badan Publik masih belum merespon adanya email permohonan informasi yang dikirimkan oleh masyarakat umum;
7. Tidak adanya alur atau petunjuk yang jelas dalam pelayanan informasi kepada masyarakat untuk sebagian badan publik;
9. Sebagian Badan Publik tidak menyediakan informasi serta merta, yang berupa informasi kedaruratan di lokasi Badan Publik, seperti petunjuk arah evakuasi, titik kumpul, dan sebagainya; dan
10. Badan Publik perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk pengembangan fasilitas dan sumberdaya manusia untuk memanager informasi publik.

**c. Nilai Pembelajaran**

Selama proses monitoring dan evaluasi, khususnya saat dilakukan visitasi secara online, terdapat pembelajaran yang dapat diambil nilainya untuk ditularkan ke Badan Publik lainnya antara lain:

1. Kreativitas PPID melakukan rekap setiap akhir bulan secara rutin atas buku register layanan informasi publik dan ditandatangani PPID;
2. Perlu dukungan anggaran untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang;
3. Perlu peningkatan pemahaman mengenai UU KIP dan peraturan pelaksanaannya di Level PPID dan PLID, melalui training dan pendampingan;
4. Perlu ruangan khusus untuk layanan informasi yang terintegrasi dengan berbagai bidang dan Komputer khusus untuk layanan informasi;
5. Perlu dibuat sistem pendokumentasian yang merujuk pada UU KIP meskipun tempat penyimpanan dokumen menyatu dengan dokumen layanan lainnya;
6. Seluruh Badan Publik perlu memberikan petunjuk arah bagi masyarakat yang akan mengakses layanan Badan Publik, sehingga memudahkan masyarakat;
7. Perlunya penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan keterbukaan informasi di setiap badan publik;
8. Peringkat keterbukaan informasi di Badan Publik menjadi salah satu kriteria penentuan kinerja Badan Publik; dan

9. Seluruh badan publik harus menanggapi seluruh permintaan informasi termasuk yang disampaikan melalui email.

## 7. Penutup

Selamat kepada para penerima penganugerahan Semoga tidak cepat berpuas diri, sehingga dapat terus semangat dalam meningkatkan budaya keterbukaan informasi publik di lembaga masing-masing. Bagi badan publik yang baru mencapai kualifikasi tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, dan menuju informatif kami berharap tahun depan dapat meningkatkan peringkatnya dan tidak berkecil hati, harus lebih termotivasi lagi dengan segera mengevaluasi, mengoreksi, dan memperbaiki praktek keterbukaan informasi publik yang berjalan Selama ini di lembaga masing-masing.. Kami juga berharap agar seluruh badan publik di DIY terus melakukan upaya dan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik sehingga Pemda DIY dapat mempertahankan peringkat informatif yang telah dicapai tahun ini, bahkan dapat meningkatkan lagi nilainya.

Kami haturkan terima kasih juga lembaga perguruan tinggi (Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Program Studi Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, dan Klinik Keterbukaan Informasi Universitas Islam Indonesia), lembaga penelitian (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), IDEA Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, Combine Resource Institution (CRI), Para Pimpinan Badan Publik di DIY, serta semua pihak yang telah mendukung monitoring dan evaluasi ini. Kami berharap monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari pembelajaran kita semua untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 22 Desember 2020

Ketua  
Komisi Informasi Daerah DIY



(H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum)